



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036/IMSertifikasi-SK/III/2017

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan PHPL IUPHHK-HTI PT. TAIYOUNG ENGREEN

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. TAIYOUNG ENGREEN** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.78/Menhut-II/2009, tanggal 05 Maret 2009 yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas ± 59.810 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 22 Februari 2017.
 3. Data pendukung penilikan kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. TAIYOUNG ENGREEN**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Maret 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HTI PT. TAIYOUNG ENGREEN**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HTI PT. TAIYOUNG ENGREEN** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **SEDANG**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

- pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 14 Maret 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN**

1) IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria
Produksi : Dasep Gunawan, S.Hut
- Auditor Kriteria Prasyarat : Setiaji Heri Saputro, S.Hut
- Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
- Auditor Kriteria Sosial : Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si
- Auditor Kriteria VLK : M. Arif Budi Utomo, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2) IDENTITAS AUDITEE :

- a. Nama Perusahaan : PT TAIYOUNG ENGREEN
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta No. 86 tanggal 31 Januari 2007, Notaris H. Yunardi, S.H.

Pengesahan akta pendirian PT TYE berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI RI No. AHU-08356.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008
- Akta Perubahan Terakhir : Akta No. 85 tanggal 16 Juni 2015, Notaris/PPAT Diah Sukma Permata Riani, S.H.

Akta telah dilaporkan dan tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0950028 tanggal 09

Juli 2015.

- c. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Pemberian IUPHHK-HTI kepada PT TYE atas Areal Hutan Produksi seluas ± 59.810 Hektar di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Kantor : Jl. Pinus No. 94 RT. 02/XI Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya.
Telp. 0536-3229531 Fax. 0536-3224077
- e. Penanggung Jawab : Drs. Sapto Winardi (Direktur)

3) RINGKASAN TAHAPAN:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|--|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | Palangkaraya, 16 Februari 2017 | - Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah - Koordinasi dengan BPHP Wilayah X Palangkaraya |
| Pertemuan Pembukaan | Kantor PT TYE (Base Camp 41), 17 Februari 2017 | Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Kantor PT TYE (Base Camp 41) dan Areal Kerja PT TYE, tanggal 16 s/d 21 Februari 2017 | a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| Pertemuan Penutupan | Kantor PT TYE (Base Camp 41), 21 Februari 2017 | a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan. |
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | Palangkaraya, 21 Februari 2017 | - Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Palangkaraya |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|---|--|
| Pengambilan Keputusan | Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 14 Maret 2017 | <p>a. PT TAIYOUNG ENGREEN dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat “SEDANG” dan VLK Hutan MEMENUHI.</p> <p>b. S-PHPL PT TAIYOUNG ENGREEN dinyatakan “TERPELIHARA” sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</p> |

4) RESUME HASIL PENILAIAN

A. KRITERIA PRASYARAT

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------|----------|------------|---|
| 1.1. BAIK (3) | 1.1.1. | Baik (3) | <p>Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TYE No. 85 tanggal 16 Juni 2015 Notaris/PPAT Diah Sukma Permata Riani, S.H); SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Pemberian IUPHHK-HTI kepada PT TYE atas Areal Hutan Produksi seluas ± 59.810 Hektar di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah; dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 29/VI-BUHT/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 atas nama PT TYE di Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Dokumen administrasi tata batas sudah lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, yang dibuktikan dengan adanya dokumen : Pedoman tata batas, Pernyataan No. 283/PB/IUPHHK-HT/2012; Instruksi Kerja No. INST.32/BPKH.XXI-3/2013 tanggal 5 Desember 2015; Laporan TBT No. LP.8/BPKH.XXI-3/2016 Tahun 2016; dan Peta Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI an. PT TYE di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Panjang 154.663,62 m Luas 56.519,37 ha, skala 1 : 25.000</p> |
| | 1.1.2 | Baik (3) | <p>Berdasarkan dokumen Laporan TBT No. LP.8/BPKH.XXI-3/2016 Tahun 2016, realisasi pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HTI PT TYE sudah 154.663,62 m dari rencana ± 150.746 m (100%) dan sudah temu gelang, tetapi ada beberapa pal batas yang tidak sesuai dengan Instruksi Kerja pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT TYE dan Persekutuan dengan Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Hasil Kalimantan Jaya di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Instruksi Kerja No. INST.32/BPKH.XXI-3/2013 tanggal 5 Desember 2015</p> |
| | 1.1.3. | Sedang (2) | <p>PT TYE telah menyusun laporan monitoring terhadap potensi-potensi konflik lahan yang akan terjadi. Hal ini menunjukkan adanya upaya PT TYE untuk melakukan monitoring potensi konflik areal dan dilakukan secara terus menerus (Mei-Desember 2016 dan Januari 2017). Akan tetapi bentuk laporan awal tersebut tidak dilanjutkan dengan membuat laporan detail dari potensi konflik tersebut.</p> |
| | 1.1.4 | Baik (3) | <p>Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhut No. 529/Kpts-II/2012, Tanggal 25 September 2012) terdapat perubahan fungsi sebagian areal PT TYE menjadi areal dengan fungsi kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 3.371 Ha (5,64%). Areal tersebut sebelumnya merupakan areal dengan fungsi kawasan sebagai Hutan Produksi Tetap (HP). Atas dasar adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT TYE telah melakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HT) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.</p> |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------|----------|------------|---|
| | | | 88/VI-BUHT/2012 tanggal 20 Desember 2012. RKT PT TYE tahun 2016 sudah disahkan dan disetujui oleh Direktur PT TYE (Sapto Winardi), serta diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Ir. Sipet Hermanto). Sebagaimana terungkap dalam Kata Pengantar RKT PT TYE tahun 2016, RKT PT TYE tahun 2016 disusun berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT TYE untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2010 – 2019. Dengan demikian perubahan fungsi kawasan sudah direspon dengan dibuatnya RKT PT TYE tahun 2016 yang mengacu dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT TYE untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2010 – 2019. |
| | 1.1.5 | Sedang (2) | Di dalam areal kerja PT TYE terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa jalan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang melintas di dalam areal PT TYE. Atas adanya jalan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tersebut, PT TYE telah melakukan pendataan dan melaporkan kepada instansi berwenang. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya laporan berdasarkan surat Surat Direktur PT TYE No. 85/TE-HTI/PLK/XI/2015 tanggal 16 November 2015. Diareal PT TYE juga dijumpai adanya BTS telepon seluler milik PT.Telkomsel. BTS ini merupakan permintaan dari manajemen PT TYE untuk memenuhi komunikasi antar karyawan di PT TYE. PT TYE belum melakukan pendataan dan pelaporan adanya pembangunan jaringan telekomunikasi tersebut kepada instansi yang terkait |
| 1.2. SEDANG (2) | 1.2.1 | Baik (3) | Dokumen visi dan misi PT TYE yang ditandatangani oleh Direksi pada tanggal 01 Agustus 2015 menunjukkan bahwa Visi PT TYE yaitu tercapainya Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHPL) yang dapat menjamin kesinambungan produksi kayu baik kuantitas maupun kualitas yang memadai adalah adanya keinginan terwujudnya hutan yang lestari. Kelestarian Hutan yang dimaksud, dijabarkan dalam misi perusahaan, yaitu untuk Kelestarian produksi, terungkap pada misi mewujudkan kepastian kawasan hutan yang dapat menjamin kepastian usaha jangka panjang, meningkatkan produktivitas hutan dengan teknologi tepat guna, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme dalam pemanfaatan hutan tanaman; untuk Kelestarian Lingkungan, terungkap pada misi mengalokasikan hutan lindung dan menjaga keberadaannya, serta untuk Kelestarian Sosial, terungkap pada misi memberdayakan masyarakat sekitar hutan dan kelembagaannya. |
| | 1.2.2 | Sedang (2) | Dalam Penilaian ke-1 ini hasilnya masih sama dengan Penilaian Awal tahun 2015, yaitu bahwa PT TYE telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi tersebut baik kepada seluruh karyawan maupun terhadap masyarakat sekitar areal kerja PT TYE. Sosialisasi karyawan dilakukan pada tanggal 1 September 2015 di Aula Rapat PT TYE Base Camp Karpas, dan sosialisasi kepada masyarakat baru dilakukan terhadap sebagian masyarakat di sekitar areal kerja PT TYE pada tanggal 01 September 2015. Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan tersebut dilakukan oleh Manajemen PT TYE kepada masyarakat yang seluruhnya berasal dari Desa/Kelurahan Mangku Baru. Sosialisasi visi dan misi PT TYE kepada masyarakat Desa lainnya yang berada di sekitar areal kerja belum dilakukan, padahal disekitar areal kerja PT TYE terdapat Desa Pilang Munduk dan Desa Tumbang Empas |
| | 1.2.3 | Sedang (2) | Implementasi visi dan misi oleh PT TYE di lapangan dalam aspek produksi, ekologi dan sosial sebagian besar sudah sesuai dengan PHL, walaupun masih terdapat mplementasi visi misi PT TYE yang belum sesuai PHL di lapangan. |
| 1.3 SEDANG | 1.3.1. | Buruk (1) | Berdasarkan data ketercukupan GANIS PHPL dalam pemenuhan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|----------|------------|---|
| (2) | | | No. P.16/PHPL-IPHH/2015, PT TYE belum memiliki GANIS PHPL pada bidang kegiatan Pemanenan Hutan, masih kurang GANIS PHPL CANHUT sebanyak 3 orang, dan masih kurang GANIS PHPL BINHUT sebanyak 2 orang. |
| | 1.3.2. | Sedang (2) | PT TYE melakukan realisasi peningkatan kompetensi SDM PT TYE pada tahun 2016 sebesar 66,67% dari rencana. Dari seluruh rencana Peningkatan Kompetensi SDM PT TYE, hanya bidang kelola sosial yang tidak terlaksana. |
| | 1.3.3. | Sedang (2) | Dokumen ketenagakerjaan di PT TYE cukup lengkap, yaitu terdiri dari SK Pengangkatan dan Penetapan sebagai karyawan tetap. Namun dokumen SK Pengangkatan dan Penetapan sebagai karyawan tetap tidak didistribusikan kepada yang bersangkutan. |
| 1.4. BAIK (3) | 1.4.1. | Baik (3) | Tersedia struktur organisasi dan job description yang termuat dalam dokumen Struktur organisasi PT TYE yang ditandatangani oleh Direktur PT TYE (Sapto Winardi). Kerangka struktur organisasi PT TYE dibuat secara detil dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan tanaman. Secara keseluruhan, struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang-bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan, kelola sosial dan bidang lainnya secara berkelanjutan. |
| | 1.4.2. | Baik (3) | Perangkat sistem informasi manajemen PT TYE yang tersedia diantaranya perangkat keras (Komputer, printer, mesin fotocopy, radio/SSB, Handy Talky, Hardisk dan Flaskdisk, alat telekomunikasi (HP, Modem), kamera, GPS dan Kompas) dan perangkat lunak (struktur organisasi, job description, data base SDM (tenaga kerja) dan Standar Operating Procedure (SOP) seluruh bagian pengelolaan hutan tanaman (bagian Ekologi/lingkungan, pengamanan & perlindungan hutan, perencanaan, produksi dan Sosial, laporan bulanan baik Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman PT TYE maupun Laporan Bulanan Administrasi Umum & Personalia). Disamping itu, tersedia tenaga pelaksana SIM PT TYE sebanyak 216 orang dengan beragam status karyawan masing masing (Karyawan Tetap, Bulanan Kontrak, Harian Tetap, Harian Kontrak, Harian Lepas, Non Kontrak, Semi Borongan dan Borongan). SDM pelaksana tersebut ditempatkan pada bidang-bidang sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya. |
| | 1.4.3 | Sedang (2) | Organisasi SPI/Internal Auditor sudah ada serta melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pemeriksaan/audit/evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan di lapangan, tetapi dalam pemeriksaannya SPI/Internal Auditor hanya fokus pada aspek produksi saja. SPI/Internal Auditor tidak melakukan pemeriksaan pada seluruh tahapan dalam aspek setiap aspek |
| | 1.4.4. | Sedang (2) | Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan SPI juga menunjukkan adanya upaya tindakan pencegahan dan perbaikan oleh manajemen. Dalam laporan ini jelas disebutkan adanya permasalahan yang harus diselesaikan dan dicegah untuk tidak terjadi lagi dalam perusahaan. Dalam laporan ini dibuatkan rekomendasi dari SPI/Auditor Internal untuk ditanggapi dan dilaksanakan, tetapi dalam Penilikan ke-1 ini tidak dijumpai dokumen laporan perkembangan/progress report dari rekomendasi SPI/Auditor Internal tersebut. Hal ini berarti goal tindakan pencegahan dan perbaikan seolah-olah terabaikan |
| 1.5 SEDANG (2) | 1.5.1. | Buruk (1) | Dokumen RKTUPHHK-HT PT TYE periode tahun 2016 telah disetujui secara mandiri (Self Approval) berdasarkan Keputusan Direktur IUPHHK-HTI PT TYE Provinsi Kalimantan Tengah No. SK.17/DIR.TE-HTI/PLK/XI/2016, tanggal 24 Nopember 2016. Namun tidak ditemukan bukti sosialisasi dan/atau persetujuan masyarakat terkait kegiatan RKTUPHHK-HT PT TYE yang akan mempengaruhi hak-hak masyarakat setempat pada periode |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------|----------|------------|--|
| | | | tahun 2016 |
| | 1.5.2. | Sedang (2) | Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT TYE berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 88/VI-BUHT/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 atas nama PT TYE di Provinsi Kalimantan Tengah, Bab II Data Pokok Sub Bab D. Sosial Ekonomi poin 1. Kependudukan, disebutkan bahwa wilayah areal kerja PT TYE termasuk dalam 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, yaitu Kecamatan Sepang, Kecamatan Rungan, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Tewah, dan Kecamatan Kurun. Berdasarkan dokumen Berita Acara Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI an. PT TYE di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, pihak kecamatan Tewah tidak termasuk pihak yang menandatangani berita acara tersebut |
| | 1.5.3. | Sedang (2) | Perencanaan kegiatan CSR PT TYE dilakukan dengan mengacu pada SK Bupati Gunung Mas nomor 213 tahun 2014 yang memuat desa sekitar yang terkena dampak kegiatan PT TYE, yang terdiri dari Desa Tumbang Empas, desa Pilang Munduk dan Desa Tuyun. Kegiatan CSR PT TYE tahun 2016 direncanakan secara sepihak oleh manajemen PT TYE dalam dokumen perencanaan RKTUPHHK HTI. Sedangkan sosialisasi kegiatan CSR PT TYE baru dilakukan secara internal oleh manajemen PT TYE kepada perwakilan PT TYE pada desa Tumbang Empas, desa Pilang Munduk dan Desa Tuyun. |
| | 1.5.4 | Sedang (2) | Sebagaimana hasil Penilaian Awal, PT TYE baru melakukan sosialisasi penetapan kawasan lindung kepada masyarakat Desa Tumbang Empas. Selama 1 tahun setelah Penilaian Awal, PT TYE belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penetapan kawasan lindung selain kepada masyarakat Desa Tumbang Empas. |

B. KRITERIA PRODUKSI

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------|----------|------------|--|
| 2.1. SEDANG (2) | 2.1.1. | Baik (3) | Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) a.n PT TYE Periode 2010 s/d 2019 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 88/VI-BUHT/2012 tanggal 20 Desember 2012. Penyusunan dokumen tersebut telah mempertimbangan deliniasi mikro yang disusun tahun 2009, terutama dalam penetapan tata ruang areal kerja. Disamping itu, terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT TYE tidak dikenai peringatan |
| | 2.1.2. | Sedang (2) | PT TYE telah melakukan penataan areal kerjanya dalam Blok dan Petak terbangun dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HT yang telah disahkan. Dari sisi realisasi luas Penataan Areal Kerja (PAK) tahun 2016 dan 2017, diketahui adanya perbedaan sebagian luas PAK yang direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HT Periode 2010 s/d 2019 A.n. PT TYE dengan rencana PAK yang termuat dalam dokumen RKTUPHHK-HT PT TYE tahun 2016. Disamping itu, terdapat sebagian perbedaan lokasi blok RKT yang direncanakan pada dokumen RKUPHHK-HT tersebut dengan rencana serta realisasi yang termuat dalam dokumen RKTUPHHK-HT pada periode yang sama (2015 dan 2016) yang disebabkan karena pada setiap rencana RKT terdapat luncuran (carry over) dari blok RKT sebelumnya |
| | 2.1.3. | Sedang (2) | Tanda batas blok dan petak areal kerja PT TYE menggunakan |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------|----------|-----------------------|---|
| | | | patok batas pada setiap sudut blok/petak dengan spesifikasi ukuran 10 x 10 cm ; tinggi 1 m – 1,5 m dari permukaan tanah (batas blok) dan (ukuran 12 x 6 cm, tinggi 1 m – 1,5 m dari permukaan tanah (batas petak) dan/atau menggunakan jalan (jalan cabang dan jalan ranting). Pada beberapa lokasi batas petak di RKT 2015/2016, tidak ditemukan adanya patok batas, papan nama petak maupun informasi terkait batas petak lainnya |
| 2.2. SEDANG (2) | 2.2.1. | Sedang (2) | PT TYE telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB tahun 2010, Laporan Hasil <i>Cruising</i> 3 (tiga) tahun terakhir dan dokumen Master Blok PT TYE 2016 yang memuat data potensi tanaman pokok periode tahun 2010 s/d 2016. Tetapi tidak disertai dengan kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.) |
| | 2.2.2. | Baik (3) | PT TYE memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP/untuk semua tipe ekosistem yang ada baik pada tegakan hutan alam maupun tegakan hutan tanaman dan seluruhnya sudah dianalisis |
| | 2.2.3. | Sedang (2) | PT TYE memiliki bukti upaya telah melakukan pengukuran dan analisis data potensi dan riap tegakan melalui pengukuran yang telah dilakukan pada Petak Ukur Permanen (PUP) tanaman (PUP 1 – 10). Pengukuran dan analisis riap tegakan tersebut dilakukan terhadap tanaman <i>Eucalyptus pellita</i> (tahun tanam 2010, 2011 dan 2013), <i>Acacia mangium</i> (tahun tanam 2011) dan <i>Paraserianthes falcataria</i> (tahun tanam 2011). Hasil pengukuran dan analisis riap tegakan hutan tanaman tersebut disampaikan melalui Laporan Kegiatan Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) PT TYE, periode tahun 2016. Namun demikian, hasilnya belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri |
| 2.3. SEDANG (2) | 2.3.1. | Sedang (2) | PT TYE telah memiliki sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan TPTJ. Sebagian SOP tersebut belum memiliki lembar pengesahan dari pimpinan <i>Auditee</i> dan terdapat beberapa SOP yang tidak memisahkan antara sistem silvikultur THPB dengan sistem silvikultur TPTJ. Selain itu, terdapat beberapa SOP yang secara teknis tidak sesuai dengan sistem silvikultur THPB maupun TPTJ dan tidak mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku |
| | 2.3.2. | Sedang (2) | Secara umum PT TYE telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik PAK, Risalah Hutan, Pengadaan Bibit, Penanaman dan tahapan lainnya. Namun demikian, pada beberapa tahapan belum dilaksanakan secara sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan pada beberapa kegiatan yang belum memiliki dokumen hasil tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam salah satu prosedur tahapan sistem silvikultur THPB |
| | 2.3.3. | <i>Not Applicable</i> | Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT PT TYE periode tahun 2010 – 2019, bahwa kelas perusahaan hutan tanaman yang dibangun adalah kelas perusahaan “kayu pertukangan” dengan daur tanaman 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan tanaman dengan umur tertua yang terdapat di PT TYE adalah tanaman dengan tahun tanam 2010 (Kelas Umur VI), yang berarti belum masuk kategori tanaman sebelum masak tebang apabila pendekatan kategori masak tebangnya adalah tanaman dengan umur 9 – 10 tahun (KU-IX, KU-X) |
| | 2.3.4. | Sedang (2) | PT TYE memiliki permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 83,33\%$ - $88,57\%$ dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan). Namun demikian, untuk tanaman pada blok RKT tahun 2015/2016, masih dilakukan kegiatan pemeliharaan sehingga pencapaian persentase tumbuh tanaman diharapkan sesuai dengan jumlah tanaman per hektar |
| 2.4. SEDANG | 2.4.1. | Sedang (2) | PT TYE telah memiliki SOP <i>Reduced Impact Logging (RIL)</i> dengan register No. (SSS/POS/PROD.04/00) dan SOP terkait lainnya. |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|----------|------------|--|
| (2) | | | Namun demikian, sebagian isi dokumen SOP tersebut belum sesuai dengan karakteristik kondisi setempat |
| | 2.4.2. | Sedang (2) | PT TYE telah mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan pada sebagian tahapan pengelolaan hutan tanaman menyangkut aspek perencanaan, pemanenan, pemeliharaan dan K3 serta pasca penebangan. Namun demikian pada masing-masing tahapan tersebut sebagian besar kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP RIL yang telah ditetapkan, seperti peta perencanaan belum menggambarkan rencana arah jalan sarad dan topografi, tidak dijelaskan prosedur penebangan untuk penebangan di areal hutan tanaman dan Implementasi penerapan K3 serta penanganan pasca penebangan yang belum dilakukan secara efektif |
| | 2.4.4. | Baik (3) | Faktor Eksploitasi (Fe) untuk penebangan penyiapan lahan pada hutan alam dengan sistem silvikultur THPB adalah (rata-rata) sebesar 71,45% |
| 2.5. BAIK (3) | 2.5.1. | Baik (3) | Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2015 A.n. PT SBB yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.300/352/Dishut, tanggal 21 Oktober 2015 dan RKTUPHHK-HA tahun 2016 A.n. PT SBB telah disahkan oleh pejabat yang berwenang secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur IUPHHK-HTI PT Taiyoung Engreen, Provinsi Kalimantan Tengah No. SK.17/DIR.TE-HTI/PLK/XI/2016, tanggal 24 Nopember 2016. Kedua dokumen tersebut dilengkapi dengan peta lampirannya dan disusun mengacu kepada dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode tahun 2010 – 2019 serta peta lampirannya |
| | 2.5.2. | Baik (3) | PT TYE telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta tersebut telah menggambarkan lokasi blok RKT tahun 2015/2016 yang terdiri dari areal yang diperuntukan sebagai areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, areal tanaman unggulan dan batas areal kawasan lindung (KPPN dan KPSL) |
| | 2.5.3. | Sedang (2) | Terdapat sebagian implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan batas blok/petak dilakukan dengan pemasangan patok batas permanen yang memuat informasi identitas blok/petak dan pembuatan jalan (jalan poros/utama, jalan cabang dan jalan ranting). Namun pada sebagian batas petak Blok RKT tahun 2106 areal kerja PT TYE tidak ditemukan penandaan batas dengan menggunakan patok batas ataupun informasi lainnya. Disamping itu, sampai dengan saat ini penataan kawasan lindung tercatat baru mencapai 85,03% dari yang seharusnya |
| | 2.5.4. | Sedang (2) | Realisasi penebangan/pemanenan pada periode tahun 2016 berdasarkan luas tercapai seluas 175 Ha (7,73%) dari total rencana luas pemanenan seluas 2.263 Ha dan volume tebangan tercapai sebanyak 6.421 m ³ (11,34%) dari total target volume tebangan sebesar 56.618 m ³ . Realisasi penebangan tersebut merupakan hasil penebangan/penyiapan lahan di areal kerja PT TYE tahun 2016 sesuai dengan RKT 2016 yang telah disahkan |
| 2.6. BURUK (1) | 2.6.1 | Buruk (1) | PT TYE tidak memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk selama periode penilaian (2015 dan 2016) |
| | 2.6.2. | Buruk (1) | PT TYE tidak memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk selama periode penilaian (2015 dan 2016) |
| | 2.6.3. | Buruk (1) | Realisasi pendanaan pengelolaan hutan tanaman PT TYE pada periode tahun 2016 tercapai sebesar Rp. 11.229.373.851,- atau 50,92% dari total biaya yang direncanakan sebesar Rp. 22.053.084.989,-. Realisasi masing-masing bidang pengelolaan hutan tanaman berkisar antara 11,16% - 89,64% dari total biaya yang direncanakan pada masing-masing bidang tersebut. |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------|----------|------------|--|
| | | | Pencapaian realisasi pendanaan pengelolaan hutan tertinggi terjadi pada kegiatan Penyiapan Lahan yaitu tercapai sebesar 89,64% (Rp. 3.611.244.913,-) dari total alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp. 4.028.500.000,-. Sedangkan pencapaian realisasi pendanaan terendah terjadi pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, yaitu sebesar 11,16% (Rp. 639.368.988,-) dari total alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp. 5.730.000.000,-. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, yaitu terdapat perbedaan realisasi pendanaan sebesar 88,84% (perbedaan lebih dari > 50%) |
| | 2.6.4. | Sedang (2) | Rata-rata total realisasi pendanaan kegiatan kelola hutan PT TYE pada tahun 2016 tercatat sebesar 50,92%. Namun demikian, berdasarkan realisasi fisik kegiatan teknis kehutanan di lapangan, menunjukkan masih terdapat pencapaian realisasi kegiatan kelola hutan yang rendah, yaitu kegiatan penanaman yang hanya tercapai sebesar 1,20%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah realisasi dana untuk kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tata waktu |
| | 2.6.5. | Sedang (2) | Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan tercapai sebesar 82,51% (Rp. 7.367.999.843,-) dari total dana yang direncanakan sebesar Rp. 8.930.245.970,-. Realisasi tersebut, merupakan realisasi dana untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penanaman, baik tanaman pokok, tanaman kehidupan maupun tanaman unggulan. |
| | 2.6.6. | Buruk (1) | Kegiatan fisik penanaman PT TYE tahun 2015/2016 direncanakan total seluas 2.648,00 Ha dan terealisasi seluas 31,84 Ha atau 1,20% |

C. KRITERIA EKOLOGI

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------|----------|------------|--|
| 3.1. BAIK (3) | 3.1.1. | Baik (3) | PT TYE telah menerbitkan dokumen Surat Keputusan Direktur PT Taiyoung Engreen No 129 /TE-HTI/KEP/PLK/XII/2013 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lindung Pada areal IUPHHK-HTI PT. Taiyoung Engreen Di Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, 21 Desember 2013. Dokumen ini merinci jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan. Baik jenis maupun luas kawasan lindung yang ditetapkan/dikukuhkan tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan jangka panjang perusahaan (RKUPHHK-HT PT TYE). Kawasan-kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya karena dialokasikan sesuai dengan fungsi perlindungannya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. |
| | 3.1.2 | Sedang (2) | Penataan kawasan lindung sampai dengan Desember 2016 sebesar 85,03 % atau tidak berbeda dengan prestasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan selama tahun 2016, PT TYE tidak melakukan penataan batas kawasan lindung baru, karena blok RKT 2016 tidak berbatasan dengan kawasan lindung yang ditetapkan. |
| | 3.1.3 | Baik (3) | Tersedia peta citra landsat terbaru hasil liputan tahun 2015 (Peta Citra Landsat 8 OLI kombinasi band 653 Path 118 Row 61 liputan tanggal 3 Agustus 2015) yang dapat dijadikan pedoman kondisi penutupan areal kerja pemegang izin termasuk kawasan lindung. Hasil telaah peta tersebut dengan peta lampiran RKUPHHK-HT PT TYE, diketahui bahwa kondisi penutupan hutan tidak berbeda dengan peta citra landsat sebelumnya. Dengan demikian kawasan lindung PT TYE yang berhutan tidak berbeda yaitu sebesar 4.931,82 ha dari total luas kawasan lindung (6.009 ha) atau sebesar 82,07 %. |
| | 3.1.4 | Sedang (2) | Pengakuan atas kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin baru sebagian dari para pihak yaitu : Pemerintah, Manajemen PT TYE dan sebagian dari masyarakat sekitar areal yaitu Desa |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------|----------|------------|--|
| | | | Tumbang Empas. Sedangkan masyarakat Desa Pilang Munduk dan Tuyun belum ditemukan bukti-bukti pengakuannya. |
| | 3.1.5 | Sedang (2) | Laporan kelola kawasan lindung yang disusun pemegang izin selama bulan Januari s/d Desember 2016 terdiri dari RKTUPPHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN Tahun 2016, Laporan Pelaksanaan Semester II 2015 dan I 2016 Pemantauan dan Pengelolaan Dampak Lingkungan, Laporan Hasil Pembuatan Batas Rintis Hutan KPPN 2016. Dengan demikian, laporan tersebut belum mencakup seluruh kawasan lindung sesuai dengan ketentuan. Laporan yang seharusnya telah disusun tetapi belum tersedia adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi potensi flora dan fauna KPPN sebagai suatu kewajiban tindak kelola areal KPPN. 2. Penandaan kawasan dan inventarisasi serta identifikasi potensi fauna areal KPSL. |
| 3.2 BAIK (3) | 3.2.1 | Baik (3) | Tersedia dokumen prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh potensi gangguan yang ada yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Penanggulangan Gangguan Satwa Liar. No Register SOP-HTI-TE/Camp/1/2015. 2. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Persemaian. No Register SOP-HTI-TE/Camp/1/2015. 3. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Pengendalian Kebakaran Hutan. No Register SOP-HTI-TE/Camp/1/2015. 4. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan. No Register SOP-HTI-TE/Camp/1/2015. 5. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Procedures (SOP) Penanggulangan Perambahan. No. Register : SOP-HTI-TE/Camp/2015. 6. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Procedures (SOP) Penanggulangan Illegal Logging. No Register : SOP-HTI-TE/Camp/1/2015. 7. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Procedures (SOP) Penanggulangan Perburuan Satwa Liar. No. Register : SOP-HTI-TE/Camp/2015. |
| | 3.2.2 | Sedang (2) | Tersedia sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan seperti peralatan perorangan (tas punggung, helm dll), peralatan kelompok (kapak, garu, gergaji besi dll), peralatan teknis (HT, teropong, pompa air dll) termasuk sarana transportasi. Namun jenis dan jumlah sarana-sarana tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PERMEN LHK RI No. 32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. |
| | 3.2.3 | Sedang (2) | Tersedia struktur Organisasi Tingkat Camp dan <i>Job Description</i> . Berdasar struktur tersebut, perlindungan hutan menjadi tanggung jawab Kabid Kelola Sosial yang membawahi beberapa kepala seksi. Bagian lainnya adalah Kepala Bagian Penyiapan Lahan yang bertanggung jawab memastikan penyiapan lahan tanpa pembakaran (<i>zero burning</i>). Dengan adanya bagian-bagian tersebut maka tugas, tanggung jawab dan wewenang perlindungan hutan PT TYE telah terdistribusi dengan baik. Tersedia 4 orang karyawan dengan kualifikasi GANIS BINHUT. Satu orang atas nama Supri Yanto pemegang Register 01007-12/BINHUT/XVII/2013 habis masa berlakunya dan 1 orang lainnya atas nama Syamsudin Register 00403-12/BINHUT/XVII/2016 diberdayakan tidak sesuai dengan kompetensinya yaitu pada Kasie PWH dan Pemanenan. Dengan demikian pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 60 %. |
| | 3.2.4 | Baik (3) | Implementasi perlindungan hutan mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yaitu perambahan, pembalakan liar, kebakaran hutan, perlindungan flora dan fauna serta gangguan hama penyakit hutan dengan tindakan preemtif, preventif dan represif seperti pendataan setiap orang yang memasuki areal kerja, penempatan pos jaga di lokasi strategis masuk ke areal kerja, aplikasi fungisida dan insektisida pada bibit di persemaian, penyitaan barang bukti <i>illegal logging</i> dll. |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|----------|------------|---|
| 3.3 SEDANG (2) | 3.3.1 | Baik (3) | <p>Tersedia prosedur kerja kelola dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan perkiraan dampak besar dan penting pada dokumen RKL dan PRL PT TYE tahun 2009. Dokumen tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Pemantauan Kualitas Air. No Register SOP-HTI-TE/Camp/I/2015. 2. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Konservasi Tanah. No Register SOP-HTI-TE/Camp/I/2015. 3. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Pemantauan Erosi. No Register SOP-HTI-TE/Camp/I/2015. 4. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Pemantauan Curah Hujan. No Register SOP-HTI-TE/Camp/I/2015. |
| | 3.3.2 | Sedang (2) | <p>Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak seperti : saluran drainase, gorong-gorong, mading-maitng, jembatan, sudetan serta alat-alat berat yang digunakan untuk membangun sarana tersebut dan untuk pemeliharaan jalan angkutan. Sarana lainnya berupa tanaman yang diusahakan untuk merehabilitasi bekas TPn dengan jenis tanaman Mahoni.</p> <p>Sarana pemantauan yang tersedi berupa OMBROMeter. Adapun sarana pemantauan yang belum tersedia adalah sarana pemantauan erosi, sedimentasi dan debit air sungai.</p> |
| | 3.3.3 | Sedang (2) | <p>Berdasarkan struktur organisasi yang tersedia, penanggung jawan kelola dampak adalah Kabid Penanaman dan Pemeliharaan dan Kabid Persemaian yang membawahi beberapa kepala seksi. Pemantauan dampak mejadi tugas Kasie Litbang dan Keling (pejabat tidak tersedia) yang berada dibawah Kabid Perencanaan Hutan.</p> <p>GANIS BINHUT tersedia sebanyak 4 orang dimana 1 orang karyawan atas nama Supri Yanto pemegang Register 01007-12/BINHUT/XVII/2013 habis masa berlakunya dan 1 orang lainnya atas nama Syamsudin Register 00403-12/BINHUT/XVII/2016 diberdayakan tidak sesuai dengan kompetensinya yaitu pada Kasie PWH dan Pemanenan. Dengan demikian pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 60 %.</p> |
| | 3.3.4 | Baik (3) | <p>Tersedia dokumen rencana kelola dampak berupa Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) PT. Taiyoung Engreen Tahun 2009. Implementasi kelola dampak sesuai dengan yang direncanakan dan mencakup seluruh komponen/parameter lingkungan yaitu : 1). Sifat fisik, kimia dan kesuburan tanah; 2). Erosi tanah; 3). Kualitas air dan; 4). Debit Air sungai.</p> |
| | 3.3.5 | Sedang (2) | <p>Dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air pT TYE berupa dokuemen RPL yang disusun tahun 2009. Adapun pemantauan dampak belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Adapun rencna pemantauan yang belum terealisasi adalah pemantauan debit air sungai. Sedangkan Komponen/Parameter Lingkungan : 1). Sifat fisik, kimia dan kesuburan tanah; 2). Erosi tanah dan; 3). Kualitas air telah terealisasi. Dengan demikian pencapaian pemantauan dampak dari yang direncanakan baru 75 %.</p> |
| | 3.3.6 | Sedang (2) | <p>Berdasar data hasil pemantauan dampak, diindikasikan masih terjadi dampak penting. Adapun komponen lingkungan yang melebihi ambang batas yang ditentukan adalah parameter air sungai yaitu BOD dan COD yang melebihi baku mutu PPRI No. 82 Tahun 2001 Tentang PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.</p> |
| 3.4 BAIK (3) | 3.4.1 | Baik (3) | <p>Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu : 1). Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Identifikasi Flora Dilindungi. No Register SOP-HTI-TE/Camp/I/2015; 2). Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Identifikasi Fauna Dilindungi. No Register SOP-HTI-TE/Camp/I/2015. Kegiatan : Identifikasi</p> |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|----------|------------|---|
| | | | Fauna Dilindungi. |
| | 3.4.2 | Sedang (2) | Tersedia data flora dan fauna yang telah diidentifikasi status perlindungan dan kategori kerawannya hasil identifikasi tahun 2015, namun belum disesuaikan dengan status kerawanan berdasar CITS dan IUCN terkini. Selain itu, masih terdapat beberapa jenis flora yang belum menjadi bagian yang diidentifikasi perlindungannya yaitu jenis-jenis anggrek dan Kantung Semar (<i>Nepenthes sp.</i>). |
| 3.5 SEDANG (2) | 3.5.1 | Baik (3) | Tersedia prosedur kelola flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mencakup prosedur kelola habitat dan perlindungan jenis antara lain seperti : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Penetapan Kawasan Lindung. No Register SOP-HTI-TE/Camp/I/2015. Kegiatan : Penetapan Kawasan Lindung. 2. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Pembuatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah. No Register SOP-HTI-TE/Camp/I/2015. Kegiatan : Pembuatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 3. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Pemantauan Vegetasi. No Register SOP-HTI-TE/Camp/I/2015. Kegiatan : Pemantauan Vegetasi 4. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Identifikasi Flora Dilindungi. No Register SOP-HTI-TE/Camp/I/2015. Kegiatan : Identifikasi Flora Dilindungi 5. Dll |
| | 3.5.2 | Sedang (2) | Terdapat tanda-tanda kelola flora yang dilindungi dan atau jarang, langka, terancam punah dan endemik oleh pemegang izin seperti peremajaan tanda batas kawasan lindung sempadan Sungai Rakupit dan areal KPPN, patroli pengamanan areal kerja, perlindungan areal dengan penempatan pos jaga dll. Namun terdapat kegiatan kelola flora penting yang belum terealisasi untuk 1 tahun terakhir yaitu, pemutakhiran data identitas perlindungan dan kategori kerawanan jenis berdasar CITES dan IUCN terbaru serta beberapa jenis flora dilindungi yang belum teridentifikasi seperti jenis-jenis anggrek dan Kantung Semar (<i>Nepenthes sp.</i>). |
| | 3.5.3 | Sedang (2) | Terdapat beberapa gangguan yang mengancam keberadaan flora yang dilindungi dan atau jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal pemegang izin. Gangguan tersebut berasal dari luar yaitu oleh kegiatan ilegal masyarakat sekitar areal kerja seperti perambahan hutan, kebakaran hutan, <i>illegal logging</i> , <i>illegal mining</i> yang cenderung tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian. Gangguan lainnya berasal dari kegiatan pemegang izin yaitu konversi hutan alam menjadi hutan tanaman yang homogen yang cenderung untuk menghilangkan unsur-unsur genetis flora tertentu apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, kondisi jenis-jenis flora tersebut relatif tidak aman. |
| 3.6 SEDANG (2) | 3.6.1 | Baik (3) | Tersedia dokumen prosedur kelola fauna yang mengacu pada peraturan perlindungan nasional (PPRI NO & Tahun 1999) dan CITES serta IUCN. Dokumen-dokumen tersebut disusun tahun 2015 mencakup kelola habitat dan perlindungan jenis. Adapun dokumen prosedur antara lain : 1). Prosedur Pembuatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah; 2). Prosedur Penanggulangan Perambahan; 3). Prosedur Identifikasi Fauna Dilindungi; 4). Prosedur Penanggulangan Perburuan Satwa Liar dan lain-lain. |
| | 3.6.2 | Sedang (2) | Selama 1 tahun terakhir (Januari s/d Desember 2016), PT TYE mengelola fauna yang dilindungi dan atau jarang, langka, terancam punah dan endemik dengan pemeliharaan kawasan lindung termasuk tanda kawasan, pengamanan areal dan pendekatan kepada masyarakat sekitar areal untuk tidak merambah hutan dll. Namun hal penting yang belum dilakukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaharui status kerawanan jenis fauna sesuai dengan status kerawanan berdasar CITES valid from 21 November 2016 dan IUCN terbaru. 2. Mengelola areal KPPN sebagaimana mestinya sesuai dengan Pedoman PEMBUATAN KPPN oleh APHI Tahun 1992 termasuk |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------|----------|------------|---|
| | | | menginventaris dan mengidentifikasi potensi jenis fauna. |
| | 3.6.3 | Sedang (2) | Terdapat beberapa gangguan terhadap jenis dilindungi dan atau jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal pemegang izin dan habitatnya. Gangguan tersebut berupa perambahan hutan dan gangguan turunannya, <i>illegal logging dan illegal mining</i> yang cenderung merusak habitat satwa termasuk konversi hutan alam menjadi hutan tanaman oleh pemegang izin apabila upaya perlindungan jenis tidak dilakukan dengan serius. Dengan demikian, kondisi fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja pemegang izin relatif tidak aman. |

D. KRITERIA SOSIAL

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|----------|------------|---|
| 4.1 SEDANG (2) | 4.1.1. | Sedang (2) | PT TYE telah menyusun dokumen yang menunjukkan pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar area kerja PT TYE berupa dokumen AMDAL, RKL-RPL tahun 2016, serta addendum AMDAL untuk Izin Industri Primernya, namun desa yang termuat hanya sebagian kecil dari desa terkena dampak. PT TYE baru melakukan pengkinian data untuk sebagian desa sekitar, yaitu Desa Pilang Munduk, Kampuri dan Tumbang Empas |
| | 4.1.2. | Sedang (2) | PT TYE telah memiliki mekanisme untuk penataan batas lahan-lahan garapan masyarakat yang berada di dalam areal kerja perusahaan dan mekanisme penyelesaian konflik untuk penataan batas, berupa SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan kawasan komunitas setempat dan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik. SOP disusun oleh manajemen PT TYE. Prosedur yang ada belum disosialisasikan kepada masyarakat sekitar yang melakukan perladangan di dalam areal kerja |
| | 4.1.3 | Sedang (2) | Tidak terdapat perubahan prosedur PT TYE, SOP yang berlaku hanya mengakomodir tentang perladangan berpindah. SOP belum memuat seluruh kegiatan masyarakat yang membutuhkan akses masuk ke dalam areal kerja PT TYE |
| | 4.1.4 | Sedang (2) | PT TYE telah melakukan kegiatan monitoring keberadaan ladang/lahan garapan dan areal yang dikuasai masyarakat untuk kegiatan lain dalam areal kerja, namun belum diidentifikasi dengan lengkap dan jelas. |
| | 4.1.5 | Sedang (2) | Dalam kegiatan penataan tata batas areal kerja PT TYE tahun 2016, telah disertakan perwakilan sebagian desa sekitar dari lampiran dokumen tata batas. Namun batas areal kerja belum disetujui oleh masyarakat sekitar, karena masih ada kegiatan masyarakat dalam areal kerja |
| 4.2 SEDANG (2) | 4.2.1 | Sedang (2) | PT TYE telah menyusun dokumen rencana kegiatan perusahaan tahun 2015 dan 2016 berupa RKTUPHHK HTI 2015 dan RKTUPHHK HTI 2016 yang memuat rencana kegiatan kelola sosial Kegiatan yang menjadi fokus PT TYE meliputi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dan pembinaan kelembagaan masyarakat. Rencana kegiatan belum dijelaskan dalam detail rencana operasionalnya |
| | 4.2.2. | Sedang (2) | Mekanisme yang ada pada PT TYE untuk pemenuhan tanggung jawab sosial tidak terdapat perubahan, yaitu tetap mengacu pada SK Bupati Gunung Mas nomor 213. PT TYE juga telah memiliki dokumen prosedur yang sah dan legal untuk kegiatan PMDH/CSR berupa SOP Perencanaan dan Kegiatan PMDH, walaupun SOP belum diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan kelola sosial. Pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT TYE selama ini masih mengacu pada SK Bupati Gunung Mas no. 213 tahun 2013. |
| | 4.2.3. | Sedang (2) | Pelaksanaan sosialisasi kegiatan PT TYE 2016 tentang kegiatan |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------|----------|------------|---|
| | | | kelola sosial/CSR hanya terhadap karyawan humas eksternal PT TYE yang dianggap mewakili desa. Namun dokumen tersebut tidak diketahui oleh pemerintahan desa terkait |
| | 4.2.4. | Sedang (2) | Kegiatan kelola sosial oleh PT TYE telah terekam bukti realisasinya dalam bentuk BAP dan dokumentasi foto periode September – Desember 2016. Realisasi kelola sosial baru berupa pembangunan infrastruktur, dari beberapa rencana kegiatan yang termuat dalam RKTUPHHK HTI yaitu: Pembangunan Penyaluran Infrastruktur terdiri dari Sarana peribadatan (2); Sarana olah raga (2); Poliklinik (1); dan Peningkatan SDM berupa Penyuluhan dan pelatihan; serta Kerjasama dengan koperasi sekitar areal HTI (1) dan Membangun kemitraan usaha (1). |
| | 4.2.5 | Sedang (2) | Pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT TYE telah terdokumentasi dalam bentuk berita serah terima bantuan, dan laporan realisasi bantuan tahun 2016. Dokumen yang ada hanya merekam kegiatan yang dilakukan PT TYE selama September – Desember 2016 |
| 4.3. SEDANG (2) | 4.3.1 | Sedang (2) | PT TYE telah memiliki data dan informasi tentang kondisi masyarakat sekitar areal kerja secara lengkap dari segi kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya dari dokumen AMDAL yang disusun tahun 2009. PT TYE telah memperbaharui pengkinian data monografi desa Tumbang Empas, Kampuri dan Pilang Munduk, namun masih belum lengkap sesuai SK Bupati Gunung Mas no. 213 tahun 2013 dan desa terkena dampak sesuai AMDAL TYE tahun 2009. |
| | 4.3.2 | Sedang (2) | PT TYE telah memiliki mekanisme kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dituangkan dalam meningkatkan akses masyarakat ke dalam hutan. Mekanisme belum lengkap dan jelas sesuai hasil identifikasi kegiatan masyarakat di dalam dan sekitar areal kerja PT TYE. Disamping itu PT TYE juga mengacu SK Bupati Gunung Mas no 213 tahun 2013 untuk mekanisme pengembangan tanaman kehidupan. |
| | 4.3.3. | Sedang (2) | PT TYE telah menyusun rencana kegiatan kelola sosial dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKTUPHHK HTI 2015 dan 2016, berupa Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan berupa Peningkatan SDM dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat berupa Kerjasama dengan koperasi sekitar areal HTI dan Membangun kemitraan usaha. Namun, PT TYE belum memiliki rencana yang dapat dioperasionalkan dari jenis rencana kegiatan tersebut. Sampai saat ini belum ada realisasi tanaman kehidupan. |
| | 4.3.4 | Sedang (2) | Kegiatan yang telah direalisasikan dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat sekitar baru berupa perekrutan tenaga kerja lokal untuk lingkung wilayah kabupaten Gunung Mas dan provinsi Kalimantan Tengah sebesar 67% dari total karyawan IUPHHK HTI. |
| | 4.3.5 | Sedang (2) | Pelaksanaan kegiatan PT TYE terkait dengan distribusi manfaat dan kewajiban kepada negara sebagian telah dipenuhi dan terdapat bukti pelaksanaannya. Distribusi manfaat untuk masyarakat sekitar dibuktikan dalam bentuk bukti serah terima bantuan dan foto kegiatan serta bukti di lapangan yang baru dapat diverifikasi sebagian (September – Desember 2016) |
| 4.4. BAIK (3) | 4.4.1 | Baik (3) | PT TYE telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat yang dituangkan dalam prosedur operasi yang legal. Prosedur yang ada telah disusun dengan mengidentifikasi potensi konflik yang ada di wilayah sekitar areal kerja PTP TYE. Prosedur yang ada juga telah memuat tujuan dan penanggungjawab penyelesaian konflik. |
| | 4.4.2 | Sedang (2) | PT TYE telah membuat pemetaan potensi konflik, yang dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Areal tahun 2016 yang disusun oleh Bagian Humas. Hasil pemantauan menunjukkan adanya penambahan konflik dari pemantauan tahun 2015. Belum disusun peta konflik berdasarkan hasil pemantauan tahun 2015 dan 2016 |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|----------|------------|---|
| | 4.4.3 | Baik (3) | PT TYE telah memiliki organisasi yang bertugas menyelesaikan konflik yang timbul dikarenakan kegiatan perusahaan. Kelembagaan yang dibentuk terdiri dari unsur perusahaan, masyarakat dan mediator jika memerlukan mediasi lebih lanjut. Dalam penyelesaian konflik di Desa Tumbang Miwan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa PT TYE memiliki organisasi dan personel serta pendanaan yang cukup untuk menyelesaikan konflik. |
| | 4.4.4 | Baik (3) | Dokumen proses penyelesaian konflik yang terjadi terkait permasalahan yang ada cukup lengkap dan jelas, yaitu dituangkan dalam bentuk Laporan kronologis dan dokumen rekaman proses penyelesaiannya. Penyelesaian konflik yang tersedia berupa penyelesaian konflik illegal logging dan tuntutan ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi pada penduduk Tumbang Miwan |
| 4.5 SEDANG (2) | 4.5.1. | Sedang (2) | PT TYE telah memiliki dokumen terkait hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Dokumen tersebut berbentuk Peraturan Perusahaan yang secara umum dapat diterapkan pada seluruh karyawan dalam lingkungan perusahaan, namun saat ini PP yang ada masih belum mendapatkan pengesahan karena masih dalam proses perpanjangan. Telaah terhadap isi dokumen dan hasil wawancara menunjukkan bahwa PT TYE telah merealisasikan sebagian hubungan industrial yang termuat dalam Peraturan Perusahaan diantaranya kepastian kerja karyawan dengan adanya kontrak kerja, perusahaan tidak keberatan jika terbentuk serikat pekerja, prosedur penyelesaian keluhan dan kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial |
| | 4.5.2 | Sedang (2) | PT TYE baru merealisasikan pengembangan kompetensi karyawan dengan penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan untuk kegiatan pelatihan yang bersifat teknis berupa penyertaan tenaga teknis Kehutanan PKBR. Perencanaan peningkatan kompetensi tidak terdokumen dengan baik karena hanya mengikuti jadwal penyelenggara. |
| | 4.5.3. | Sedang (2) | PT TYE telah memiliki mekanisme untuk perekrutan, pengangkatan hingga kenaikan jenjang karir. Implementasinya ditelaah dari formulir-formulir terkait ketenagakerjaan yang ada. Evaluasi terhadap karyawan yang akan berubah status dilakukan oleh atasan yang bersangkutan dalam proses perubahan status karyawan. Dokumen ketenagakerjaan belum lengkap dan terdistribusi dengan lengkap untuk salinan karyawan |
| | 4.5.4. | Sedang (2) | PT TYE telah memenuhi kewajiban perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan dalam lampiran SK IUPHHK HTI. Dokumen-dokumen yang ada terkait kesejahteraan karyawan telah merupakan implementasi dari beberapa kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan SPK antara PT TYE dan karyawan, meliputi fasilitas tempat tinggal, ibadah, olah raga, sarana kesehatan dan perlengkapan K3. Prosedur K3 telah lengkap, namun masih terdapat karyawan/personel perusahaan yang tidak menggunakan APD sesuai ketentuan yang ada. Pelayanan kesehatan cukup memadai untuk karyawan PT PT TYE dengan adanya klinik kesehatan yang melayani grup perusahaan. |

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

| Prinsip/ Kriteria/ Indikator | Verifier | Hasil Verifikasi | Ringkasan Hasil Verifikasi |
|------------------------------------|----------|------------------|---|
| P1/K1.1/11.1.1 | 1.1.1 a | Memenuhi | PT TYE mendapat SK IUPHHK-HT No. SK.78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 dengan luas \pm 59.810 (Lima Puluh |

| Prinsip/ Kriteria/ Indikator | Verifier | Hasil Verifikasi | Ringkasan Hasil Verifikasi |
|------------------------------------|----------|------------------|---|
| | | | sembilan Ribu Delapan Ratus Sepuluh) Hektar di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dilampiri peta areal kerja skala 1:100.000 |
| | 1.1.1 b | Memenuhi | PT TYE telah memenuhi kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK pada tanggal 2 April 2009 yang jumlahnya sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) S.250/VI-BIKPHH/2009 tanggal 1 April 2009 sejumlah Rp. 155.506.000,- |
| | 1.1.1 c | Memenuhi | Di dalam areal PT TYE terdapat penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan jalan dalam kawasan hutan pada areal PT TYE yang memotong Kawasan Lindung (KPPN) yang dicadangkan sesuai dengan RKU - PT TYE telah membuat Surat dengan perihal mohon penjelasan kepada dinas kehutanan dan dinas pekerjaan umum Kabupaten Gunung Mas, dengan nomor : 85/TE-HTI/PLK/XI/2015 tanggal 16 November 2015 - PT TYE melayangkan surat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat nomor 113/TE-HTI/PLK/XII/2015 tentang permohonan petunjuk dan arahan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. Surat tersebut mendapat tanggapan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat nomor 522.1.100/36/Dishut yaitu untuk meminta arahan kepada Dirjen PHPL Kementerian LHK RI - PT TYE telah membuat surat yang berisi dukungan atas pembangunan jalan raya tersebut yang melewati areal HTI dengan surat nomor 41/TE-HTI/PLK/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 |
| P2/K2.1/I2.1.1 | 2.1.1 a | Memenuhi | Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) Periode 2010 s/d 2019 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000, RKTUPHHK-HT tahun 2015 dan tahun 2016 beserta peta lampirannya dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang |
| | 2.1.1 b | Memenuhi | PT TYE telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKUPHHK. Berdasarkan verifikasi pada lokasi blok RKTUPHHK-HT tahun 2015 dan 2016 tidak terdapat kawasan lindung sebagaimana telah ditetapkan pada tata ruang yang direncanakan |
| | 2.1.1 c | Memenuhi | Peta blok/petak tebangan PT TYE RKT 2015 dan 2016 telah disahkan oleh pihak yang berwenang, posisi batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan |
| P2/K2.2/I2.2.1 | 2.2.1 a | Memenuhi | PT TYE telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT periode 2010 s/d 2019 yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.88/VI-BUHT/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 Atas Nama PT TYE di Provinsi Kalimantan Tengah |
| | 2.2.1 b | Memenuhi | Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan dapat diketahui bahwa volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahan PT TYE telah sesuai antara dokumen RKTUPHHK-HTI dan kenyataan lapangan |
| P3/K3.1/I3.1.1 | 3.1.1.1 | Memenuhi | Seluruh kayu yang ditebang telah dibuat LHP-nya oleh petugas pembuat LHP yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil uji petik fisik kayu di TPK dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian |

| Prinsip/ Kriteria/ Indikator | Verifier | Hasil Verifikasi | Ringkasan Hasil Verifikasi |
|------------------------------------|----------|--------------------|---|
| P3/K3.1/I3.1.2 | 3.1.2.1 | Memenuhi | Kayu yang diangkut keluar seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SKSHHK. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB dengan dokumen LHP (penambahan) dan dokumen SKSHHK menunjukkan adanya kesesuaian |
| P3/K3.1/I3.1.3 | 3.1.3 a | Memenuhi | Terdapat tanda PUHH pada kayu bulat berupa label berisi informasi mengenai lokasi blok RKT dan petak tebang. Tanda pada kayu bulat sesuai dengan dokumen buku ukur. Apabila kayu telah di input pada system SIPUHH, maka akan ditambahkan label berupa barcode yang di dapat dari SIPUHH |
| | 3.1.3 b | Memenuhi | Terdapat sistem tata usaha kayu yang dijalankan oleh PT TYE mulai dari kegiatan ITSP sampai dengan penandaan identitas kayu serta pendokumentasian yang dilakukan oleh petugas yang berwenang termasuk dokumen yang menyangkut pengangkutan/ pemindahan kayu. Hanya saja pada periode audit tidak terjadi pengangkutan/ pemindahan kayu, namun PT TYE telah menunjuk petugas penerbit SKSHHK |
| P3/K3.1/I3.1.4 | 3.1.4. | Memenuhi | Dokumen SKSHHK lengkap dan sah diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHHK |
| P3/K3.2/I3.2.1 | 3.2.1 a | Memenuhi | Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR yang diterbitkan periode Januari – Desember 2016 sesuai dengan LHP yang disahkan baik kelompok jenis, volume, maupun tarifnya. Total tagihan PSDH ialah Rp 448,852,280.00 dan DR 100,359.94 USD dengan total volume 6421 m3 |
| | 3.2.1 b | Memenuhi | PT TYE telah melunasi pembayaran PSDH dan DR untuk periode Januari – Desember 2016 dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan. Total pelunasan tagihan PSDH dan DR PT TYE yaitu sebesar Rp 448,852,280.00 untuk PSDH dan 100,359.94 USD untuk DR. |
| | 3.2.1 c | Memenuhi | PT TYE telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P. 68. Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan |
| P3/K3.3/I3.3.1 | 3.3.1. | Memenuhi | Terdapat dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) PT TYE berdasarkan SK Nomor 104/UPP/PKAPT/12/2015 tentang Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar an. PT Taiyoung Engreen tanggal 18 Desember 2015, akan tetapi selama periode audit PT TYE belum pernah melakukan kegiatan pengangkutan kayu menggunakan kapal |
| P3/K3.3/I3.3.2 | 3.3.2. | Tidak Diverifikasi | PT TYE tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau sehingga dalam pengangkutannya tidak menggunakan kapal |
| P3/K3.4/I3.4.1 | | Memenuhi | PT TYE telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada dokumen SKSHHK dan barcode yang ditempel pada kayu bulat dengan No. IMS-SPHPL-011-LPPHPL-015-IDN |
| P4/K4.1/I4.1.1 | 4.1.1.1 | Memenuhi | Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/53/2009 tanggal 12 Februari 2009 |
| P4/K4.1/I4.1.2 | 4.1.2 a | Memenuhi | Terdapat dokumen RKL dan RPL meliputi 3 (tiga) tahap yakni tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasional sesuai dengan yang tertuang dalam ANDAL |

| Prinsip/ Kriteria/ Indikator | Verifier | Hasil Verifikasi | Ringkasan Hasil Verifikasi |
|------------------------------------|----------|------------------|---|
| | 4.1.2 b | Memenuhi | Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagian telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan |
| P5/K5.1/I5.1.1 | 5.1.1 a | Memenuhi | Tersedia dokumen Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tahun 2015 dan Keputusan Direktur PT TYE Nomor : 002/TE-HTI/SK/PLK/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT TYE |
| | 5.1.1.b | Memenuhi | PT TYE telah menyediakan peralatan K3 atau alat pelindung diri bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lainnya. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik |
| | 5.1.1 c | Memenuhi | Terdapat catatan kecelakaan kerja PT TYE periode 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa selama periode tahun 2016 (audit) tidak terdapat kecelakaan kerja (nihil) |
| P5/K5.2/I5.2.1 | 5.2.1.1 | Memenuhi | Tidak terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat Surat pernyataan nomor : 003/TE-HTI/SP/PLK/V/2015 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sapto Winardi selaku Direktur PT TYE yang berisi tentang kebebasan kepada seluruh karyawan PT TYE, dalam rangka membentuk Organisasi atau Serikat Pekerja sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan serta undang undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia |
| P5/K5.2/I5.2.2 | 5.2.2.1 | Memenuhi | Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas nomor SK.560/61/DSTKT/XI/2015 tanggal 05 November 2015 dan berlaku sampai 05 November 2015. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak PT TYE telah mengajukan surat permohonan perpanjangan Peraturan Perusahaan kepada Dinas terkait dengan nomor permohonan 86/TE-HTI/PLK/XI/2016 tanggal 10 November 2016 dan mendapat tanda terima pengurusan pada tanggal 14 November 2016 dengan cap dan tanda tangan dari DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Gunung Mas |
| P5/K5.2/I5.2.3 | 5.2.3.1 | Memenuhi | Berdasarkan telaah dokumen tenaga kerja PT TYE (bulan Januari 2017) dan hasil wawancara serta verifikasi di lapangan ditemukan tenaga kerja dibawah umur A.n. Krise Harapanku yang lahir pada tanggal 27 Juli 1999 yang bekerja sebagai Helper. Karyawan tersebut mulai bekerja pada 12 November 2016 atau pada saat itu berumur 17 tahun 4 bulan. Terdapat surat pernyataan dari wali orang tua yang bersangkutan bahwa telah memberikan izin dikarenakan kedua orang tua telah meninggal sehingga membutuhkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai oleh Aning Latik yang merupakan Paman dari Krise Harapanku |



SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL-011



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. TAIYOUNG ENGREEN

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI
Nomor: SK.78/Menhut-II/2009 Tanggal 05 Maret 2009
Luas Areal : ± 59.810 Ha
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016

Dengan predikat kinerja PHPL : SEDANG

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya
Kota Bekasi 17144 - INDONESIA

REV.1

Tanggal Sertifikat : 04 Januari 2016
Masa Berlaku 04 Januari 2016 s.d 03 Januari 2021